

ANTROPOLOGIS TENTANG *TRAFFICKING* TKW DI MALAYSIA: ANTARA ADA DAN TIADA

Tri Marhaeni Pudji Astuti
Jurusan Sosiologi dan Antropologi FIS Unnes

Abstract

Trafficking has existed since the period of kingdoms in Java, going on to the colonialism period, and to the present time. Its meaning is broadening beyond human trading into the matters related to violence, blackmailing, and forcing. Trafficking happens not only within one specific area, but has crossed the border of countries, indicating the existence of an international net. The mushrooming of trafficking is due to weak law and political commitment of the concerning countries. Moreover, the bilateral talk to banish trafficking has not been maximally conducted. The actors of trafficking vary from man-power brokers, agents, taxi drivers, and even officers (of transmigration and police offices). Trafficking happens in various places ranging from luxurious spots or starred-hotels to plantations and areas which accommodate a lot of migrants. The victims are usually in so unfavorable bargaining positions that they are much dependent on those traffickers. This dependency is the impact of imbalanced gender relation. Based on some existing cases, it is indicated that the women's lack of power, strength, information, and education are often misused by the traffickers to take them as their preys. That is why empowering migrant women is very crucial. One of the ways is empowering them through their realization that this need comes from their own selves, not from any force outside. Besides, there should be strong commitment from the state to seriously implement the law against any traffickers. Cooperation between the concerning countries are also needed, for instance by issuing common regulations to banish trafficking.

Key words: Trafficking, migrant women, receiving country, sending country, trafficker

PENDAHULUAN

Trafficking atau yang sering disebut perdagangan perempuan (termasuk anak-anak) sebenarnya bukan hal baru yang terjadi akhir-akhir ini saja. Fenomena perdagangan perempuan sebenarnya sudah mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang. Biasanya tujuan perdagangan perempuan dan anak adalah untuk tujuan seksual yang dibalut dengan alasan pekerjaan. Pada masa-masa sebelum maraknya migrasi perempuan ke luar negeri sebenarnya fenomena *trafficking* juga sudah ada, hanya saja upaya pemberantasan, perlindungan perempuan dan anak serta pengadilan *trafficker* (*germo*) selalu menghadapi tembok tebal yang penuh

misteri.

Fenomena *trafficking* menjadi semakin marak seiring maraknya migrasi perempuan ke kota dan ke luar negeri. Sayangnya data secara statistik tidak bisa secara pasti menjadi pedoman bagi kita untuk menanggulangnya. Secara fakta, data tidak tersedia tetapi selalu saja pemberitaan di media kita dengar adanya kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak yang dibalut dengan dalih mencari pekerjaan. Secara nyata kita mendengar, melihat dan menyadari adanya *trafficking*, namun sangat sulit jika kita akan mencari data statistiknya. Kasus di Jawa Tengah yang tidak tercatat secara pasti menandakan hal ini. Oleh karena itu, seperti antara ada dan tiada.

Pengertian *trafficking* semula hanya diartikan oleh PBB sebagai perdagangan manusia untuk prostitusi dan kejahatan, namun akhir-akhir ini banyak pengertian yang lebih luas dan lebih komprehensif. Seperti yang didefinisikan oleh GAATW (1997), *trafficking* adalah seluruh aktivitas perekrutan dan atau *transport* seorang perempuan (anak) di dalam atau melewati batas negara untuk dijual, bekerja, atau melayani laki-laki dengan cara kekerasan, penipuan, atau bentuk-bentuk paksaan dan kekerasan lain. Konsep ini menjadi lebih luas tidak terbatas pada tujuan prostitusi dan kejahatan saja, melainkan juga pada melihat perdagangan perempuan untuk tujuan perbudakan, pelacuran, menjadi pengemis, dan mempekerjakan anak dibawah umur.

Migrasi perempuan ke luar negeri (TKW) makin membuat fenomena *trafficking* ini menjadi nyata, ditambah lagi dengan makin banyaknya TKI yang ke luar negeri pula. Kasus di Malaysia menunjukkan ada sesama TKI yang justru menjadikan teman-teman TKW-nya dijual kepada TKI lain. Dan mereka sudah selalu mengatakan “tahu sama tahu”.

Tulisan ini akan membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan fenomena *trafficking*, dengan ilustrasi beberapa kasus dan isu tentang TKW dari Jawa Tengah di Malaysia, yang tentu saja hanya sebagai bahan pemikiran dan diskusi untuk menelorkan kebijakan yang lebih berpihak kepada perempuan dan anak sebagai korban.

Menurut Hull *et.al.* (1997:2) perdagangan perempuan dan anak sudah berjalan sejak zaman kerajaan di Jawa, yaitu dengan adanya praktik perseliran. Perdagangan

perempuan pada jaman kerajaan di Jawa yang sering terjadi adalah perempuan dari kelas masyarakat bawah yang dijual oleh keluarganya kepada kerajaan (keluarga istana) dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana sehingga dapat meningkatkan status keluarga itu.

Pada zaman penjajahan, perdagangan perempuan dilakukan lebih sekedar untuk melayani nafsu para serdadu dan orang Eropa lainnya. Hal ini dilatar belakangi oleh kultur masing-masing (penjajah dan pribumi) yang tidak mempeprkenankan perkawinan antar ras. Akibat pandangan tersebut hubungan antar ras menjadi ilegal dan ada perdagangan perempuan dari orang pribumi kepada masyarakat Eropa (penjajah) dengan tujuan komersial.

Praktik perdagangan perempuan dan anak pada masa penjajahan Jepang betul-betul hanya merupakan budak nafsu bagi serdadu jepang. Mereka dibawa dari kota lain atau dari desa ke kota-kota yang dijerat dengan penipuan berupa tawaran pekerjaan yang cukup baik bagi para perempuan dewasa, sedangkan bagi anak yang masih bersekolah ialah tawaran untuk bersekolah di kota atau di Tokyo. Namun kenyataannya mereka dipakasa sebagai pelayan nafsu para serdadu Jepang secara terjadwal.

Perdagangan perempuan dan anak skala internasional, khususnya di Asia secara geografis depetakan oleh Aegile Fernandez (1998). Dia memetakan perdagangan perempuan dan anak di kawasan Asia dengan mengidentifikasi negara pengirim (*sending countries*) dan negara penerima (*receiving*

countries). Sindikat dan tata kerjanya sangat rapi karena didukung teknologi canggih dan organisasi yang rapi. Menurutnya, negara di kawasan Asia yang paling banyak mengirim anak untuk diperdagangkan ke luar negeri adalah Filipina. Sebenarnya, pengekspor anak perempuan terbesar adalah Thailand, tetapi melalui negara lain (Filipina dan Malaysia).

Perdagangan perempuan, merupakan kekerasan berbasis gender (*gender based violence*). Pola hubungan tatanan sosial yang lebih menonjol terjadi dalam praktik perdagangan perempuan dan anak adalah meluasnya pola hubungan vertikal dominatif, artinya bahwa para pelaku dengan segala otoritasnya baik secara psikologis maupun kapital terlalu menguasai atau mendominasi para korban. Dalam praktik *trafficking*, para korban berada dalam posisi yang lemah dan diskenario untuk selalu tergantung, baik secara institusi (Lembaga yang berkedok penyalur tenaga kerja tapi menjalankan perdagangan perempuan) maupun personal, kepada para aktornya (*trafficker*). Ketergantungan secara personal dikondisikan dengan berbagai cara tertentu sehingga mereka merasa membutuhkan para aktor, baik untuk kebutuhan rasa aman maupun kebutuhan secara ekonomis (Tamagola, 2000; Suyanto, 2002).

Dengan relasi yang tidakimbang antara perempuan dan aktor (bisa laki-laki bisa perempuan), dengan tiadanya posisi tawar perempuan yang menjadi korban, semakin memudahkan proses praktik-praktik *trafficking*. Apalagi jika cara-cara yang digunakan dengan menggunakan bargaining posisi aktor dan dengan mengancam

kelangsungan hidup keluarga korban. Akan menjadi semakin rumit manakala perempuan terpaksa mengikuti kemauan para *trafficker*, demi menyelamatkan hidup keluarganya, karena korban sendiri akan enggan melapor atau memunculkan kasusnya demi menyelamatkan keluarga. Agaknya hal inilah yang menjadi pilihan banyak korban, seperti halnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan lainnya. Hal ini pula yang menjadi salah satu sebab, mengapa secara kuantitatif *trafficking* sulit dilacak.

Perempuan dan anak menjadi rentan sebagai obyek perdagangan manusia, karena perlindungan hukum terhadap mereka belum maksimal. Negara belum mempunyai komitmen politik yang kuat untuk melindungi warganya dari obyek perdagangan dan perbudakan. Prostitusi di Indonesia misalnya, secara hukum dianggap ilegal, karena itu prostitusi dianggap melanggar hukum. Cara pandang ini yang mendasari berbagai aksi penggrebagan, pencidukan, atau penutupan tempat praktek prostitusi. Ironisnya, berbagai kasus tampak meski dikemas dalam bentuk penggrebagan pelacur dan laki-laki *hidung belang*, selalu yang tampak dan ditangkap adalah perempuannya. Status ilegal ini yang membuat PSK (Pekerja Seksual Komersial) menjadi sangat tergantung pada perlindungan dari mucikari dan aparat keamanan. Pemerasan yang kemudian dialami oleh PSK dari para 'pelindung'nya itu kemudian dianggap menjadi ongkos yang memang sudah semestinya dibayar oleh PSK tersebut. Dengan demikian PSK berada dalam posisi hukum yang tidak berdaya untuk melindungi diri dari pemerasan para 'pelindung'nya.

METODE PENELITIAN

Naskah ini adalah bagian dari data penelitian yang dilakukan kepada para TKW dari Jawa Tengah di Malaysia dan Singapura. Hasil penelitian secara lengkap ditulis dalam bentuk disertasi. Data tentang *trafficking* ini merupakan sebagian kecil temuan peneliti yang secara tidak sengaja sangat menarik minat peneliti untuk melakukan pengamatan lebih lanjut. Sebenarnya *trafficking* tidak menjadi fokus penelitian dalam disertasi penulis, akan tetapi karena fenomena ini dijumpai di Malaysia, maka peneliti sengaja mengambil data secara lengkap, dan berharap data-data ini dapat dipublikasikan.

Metode yang digunakan dalam meneliti *trafficking* ini pertama-tama peneliti secara kebetulan atau tidak sengaja ketemu seorang informan yang juga sebagai sopir taksi. Informan inilah yang menunjukkan tempat-tempat di mana terjadi *trafficking* secara terselubung. Setelah tahu tempatnya peneliti mencoba tinggal di tempat tersebut, seperti di barak-barak penampungan tenaga kerja dari Indonesia dalam sebuah pembangunan apartemen besar. Lokasi ini namanya *Pantai Hill Park Kuala Lumpur*, ada beberapa unit apartemen yang akan dibangun, dengan mempekerjakan 250 pekerja dari seluruh Indonesai, 25 orang diantaranya adalah perempuan, dan 5 orang perempuan dari Jawa Tengah.

Selain di *Hill Park*, peneliti juga tinggal dengan para TKW di petak-petak yang disewa para TKW. Lokasi ini terletak di *Taman Danau Desa Kuala Lumpur*. Ada 20 pekerja wanita 6 orang diantaranya dari Jawa Tengah. Di Lokasi ini juga dapat diamatai bagaimana

ada kesepakatan-kesepakatan tertentu antara perempuan migran (TKW) dengan TKI untuk menikah siri demi mencukupi kebutuhan.

Wawancara mendalam dapat dilakukan setiap saat mengingat peneliti tinggal di lokasi penelitian, bahkan menyamar menjadi *Cleaning Sevice* di *Kantor Telekom Taman Danau Desa Kuala Lumpur*. Observasi juga dengan leluasa dilakukan oleh peneliti karena para TKW dan TKI menerima peneliti dengan antusias dan *wellcome*. Mereka merasa senang bertemu dengan orang dari Jawa Tengah (Indonesia).

Analisis data dilakukan secara kontekstual dan interpretatif. Artinya peneliti melihat makna dan konteks dari setiap peristiwa, sehingga dapat dilihat latar belakang, motivasi dan tujuan dari mereka melakukan *trafficking*. Analisis interpretatif dilakukan peneliti dengan menginterpretasikan simbol dan lambang serta makna ucapan para subyek penelitian. Hasil analisis dituliskan secara naratif dan deskriptif dengan ilustrasi kasus-kasus, sehingga menarik untuk dibaca, dan tidak monoton serta kaku seperti laporan penelitian pada umumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaringan Trafficking

Pembantu rumah tangga (PRT) juga rentan terhadap perbudakan karena PRT belum diakui oleh sistem hukum di Indonesia sebagai suatu pekerjaan dan karena itu hukum ketenagakerjaan tidak berlaku untuk sektor PRT ini. Situasi yang sama juga terjadi pada TKW yang dipekerjakan sebagai PRT di luar negeri. Banyak TKW dikirim melalui

prosedir yang ilegal, akan tetapi meskipun dikirim secara legal, status pekerjaan sebagai TKW juga belum mendapatkan perlindungan hukum di negara-negara tersebut, membuat TKW rentan menjadi obyek perbudakan. Situasi ekstrim terjadi di Timur Tengah, karena di kawasan tersebut, perbudakan masih tersisa dalam kultur mereka. Dengan membayar tinggi kepada calo yang menjual TKW kepadanya, mereka menganggap TKW tersebut adalah budaknya, sehingga mereka bebas memperlakukan apa saja terhadap TKW tersebut, termasuk melakukan kekerasan fisik dan seksual.

Indonesia merupakan negara penyuplai tenaga kerja perempuan terbesar di dunia, dan banyak dari mereka “dijual” sebagai pekerja seks. Khofifah Indar Parawansa menaksir bahwa 63 persen dari 6800 TKW (4300 orang) menjadi pekerja seks. Hal ini termasuk yang di kirim ke Hongkong, Taiwan, dan Jepang. Indonesia juga negara yang memiliki banyak pelacur dari anak-anak. Diduga pelacur anak dibawah umur 18 tahun adalah 30 persen dari seluruh pekerja seks di Indonesai, atau 40.000-70.000 dari 140.000-230.000 (*Kompas, 10/5/2001*).

Perdagangan perempuan dan anak bukanlah kegiatan individual dan bersekala kecil, tetapi cenderung kegiatan yang bersekala luas (nasional bahkan internasional), dengan organisasi perdagangan yang sangat rapi, sehingga memerlukan penanganan yang sangat serius, komprehensif dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh kekuatan bangsa, bahkan kerjasama antar bangsa dan negara. Pola perdagangan perempuan dan anak dapat diidentifikasi dalam beberapa hal sebagai

berikut: *a) Sindikat*: Perdagangan perempuan dan anak sebgaiian besar merupakan kerja para sindikat yang sangat terorganisasi, dan bekerja tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi juga nasional, tau bahkan internasional. Perdagangan seperti ini juga sangat terkait dengan industri porstitusi yang bernilai miliaran rupiah. *b) Jaringan*: Para *trafficker* membentuk suatu jaringan yang acapkali melibatkan aparat keamanan dan peradilan, sebagai *backing*-nya, dan petugas imigrasi sebagai pelicin dalam penyaluran perempuan dan anak dan karena itu sulit untuk tersentuh oleh hukum. *c) Teknologi tinggi*: Para sindikat banyak yang menggunakan teknologi tinggi seperti *Hand Phone*, radio taksi, atau sejumlah mobil yang digunakan secara berganti-ganti untuk menghilangkan jejak dalam membawa korban *trafficking* ke tempat tujuan. *d) Tempat mewah*: Berbeda dengan anggapan umum bahwa perdagangan seperti ini berlangsung di tempat-tempat yang murah, kumuh, atau kotor, dalam kenyataannya korban seringkali ditempatkan di apartemen mewah, kondomonium, hotel bintang 5, dan sebagainya. Tempat-tempat seperti ini justru lebih aman dari pemantauan aparat keamanan. Beberapa kasus di Malaysia agaknya berbeda dari pola ini mengingat perdagangan perempuan dilakukan oleh sesama TKI. Biasanya mereka melakukan transaksi antar sesama pekerja dan dilakukan di rumah-rumah/bilik-bilik kontrakan mereka di Malaysia. Ada juga yang dilakukan di bedeng-bedeng tempat tinggal mereka selama mereka mengerjakan proyek bangunan, bahkan di perkebunan. Kasus di salah satu tempat kontrakan TKW ilegal di Taman Danau

Desa Kuala Lumpur bisa menjelaskan hal ini.

e) *Umur dan harga korban*: Semakin muda umur perempuan semakin mahal harganya, oleh karena itu para *trafficker* cenderung mencari anak-anak atau perempuan muda dan masih perawan untuk dijadikan korban *trafficking* karena mereka mempunyai harga jual tinggi. Pengalaman penulis selama penelitian menunjukkan hal ini, bagaimana penulis mencoba memberanikan diri untuk ditawarkan kepada calo di Sungai Wang Malaysia. Oleh sopir taksi yang membawa penulis terjadi dialog menyangkut status dan umur, ketika sopir tersebut tahu bahwa penulis sudah mempunyai anak harga turun dari 1000 ringgit semalam menjadi 500 ringgit, dan kenyataannya memang penulis akan ditawarkan pada laki-laki yang tinggal di sebuah hotel bintang 5 dan bertarif sangat mahal di Sungai Wang.

Dengan fenomena tersebut di atas dapat dilihat bahwa sebenarnya masalah perdagangan perempuan dan anak adalah masalah yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Banyak asumsi dan stereotip yang memandang perempuan sebagai benda dan barang yang sah untuk dipertukarkan atau sebagai hadiah, sehingga sosok perempuan sangat tidak dihargai bahkan sangat direndahkan. Konsep dan stereotip yang dilanggengkan budaya patriarki ini menjadi demikian kental dan menjadi *blue-print* di masyarakat bahwa perempuan bertugas melayani laki-laki yang diasumsikan tidak hanya pada suami (harusnya) tetapi juga pada semua laki-laki termasuk majikan. Pandangan ini tidak saja ada pada *trafficker* atau pada masyarakat atau ada pada laki-laki, lebih ironis

lagi juga ada pada perempuan (TKW). Kasus di Johor di Konsulat penulis secara sepintas bertanya pada para TKW yang bermasalah dan ditampung di Konsulat, apakah mereka tahu apa yang disebut dengan asuransi kerja? Dengan lugas menjawab bahwa asuransi adalah (kata PT) bahwa kita tidak boleh membantah, kita harus patuh dan tunduk pada majikan, dan harus mau mengerjakan apa saja. Betapa menyedihkannya!

***Trafficking* TKW di Malaysia Antara Ada dan Tiada**

Meningkatnya permintaan tenaga pembantu rumah tangga dari Malaysia pada Indonesia, diikuti dengan meningkatnya kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak. Meningkatnya jumlah TKI (laki-laki) juga turut memacu tumbuh suburnya *trafficking* di Malaysia antar sesama pekerja. Biasanya ada 2 pola *trafficking* di Malaysia: a) Agen di Indonesia sengaja merekrut perempuan untuk prostitusi di Malaysia. b) Direkrut dengan dijanjikan sebagai pembantu rumah tangga tetapi sampai di sana oleh agen di Malaysia disuruh bekerja di bar-bar, hotel dan melayani tamu dengan alasan lowongan untuk pembantu belum tersedia jadi sementara bekerja di bar-bar dan hotel dulu (Jones, 2000).

Cara yang ditempuh aktor/calo untuk merekrut TKW bermacam-macam, ada yang secara berkelompok ada yang secara perorangan. Secara berkelompok para calo berpura-pura sebagai pimpinan agen dan anak buahnya kemudian merayu perempuan-perempuan muda di desa untuk dipekerjakan di hotel, restoran, atau sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji yang tinggi. Para

perempuan muda di desa tentu saja percaya karena melihat para tetangga yang sudah kembali dari Malayasia mempunyai uang banyak dan bisa membeli barang-barang perabotan serta bisa membangun rumahnya. Rute yang dijalani biasanya ada banyak jalur yang di tempuh salah satunya adalah dari Surabaya ke Makasar, dengan pesawat atau kapal, kemudian dari Makasar ke Pare-pare menyeberang ke Nunukan di Kalimantan Timur kemudian ke Tawau, Sabah adalah tujuan terakhir di penampungan.

Ternyata tidak hanya mulai dari perekrutan sejak di Indonesai saja mereka mulai diperdagangkan, kasus yang terjadi di Konsulat Penang ketika penulis berkunjung di sana, bisa dijadikan acuan:

Ada 16 perempuan muda dengan berbagai kasus ditampung menunggu untuk di kembalikan ke Indonesia. Rata-rata mereka semua telah mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh majikan, hampir semuanya tak di beri gaji dan dokumen disita majikan dengan tanpa dokumen selembarpun, mereka datang ke konsulat yang sudah melalui liku-liku perjalanan yang kadang makin menakutkan. Karena hampir semua TKW kita tidak tahu alamat konsulat terdekat, tidak tahu nomor teleponnya. Pada saat itu hampir semua TKW tersebut stress justru ketika tahu akan di pulangkan ke Indonesia, karena mereka akan dipulangkan lewat darat dan hanya dibekali surat jalan dari konsulat. Mereka mengeluh, sangat takut jika dipulangkan naik Bus apalagi jika tak ada keluarga yang menjemput, karena pada kenyataannya, ketika Bus tiba di Medan, atau Tanjung Balai atau Batam, di sana sudah banyak tersedia Bus-Bus lain dengan tujuan kota-kota di Jawa tengah dan Jawa Timur dan para laki-laki berseragam yang mengarahkan mereka masuk ke Bus-Bus tersebut. Para perempuan tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya di tipu lagi. Karena begitu perempuan itu sudah masuk ke Bus yang disediakan, mereka bukan diantar ke daerah asal tetapi kembali dimasukkan ke Malaysia dengan paspor yang sudah siap dengan identitas palsu. Mereka kembali dipekerjakan di tempat-tempat pelacuran, hotel-hotel dan restoran. Sementara pihak Konsulat sudah tidak mau tahu dengan keselamatan para TKW yang dipulangkan

dengan cara seperti itu, karena Konsulat sudah merasa bertanggungjawab menanggapi masalah mereka dan sudah memulangakan, soal sampai atau tidak sudah bukan urausan konsulat lagi.

Fenomena tersebut justru makin menjadikan TKW kita semakin merasa tak punya kekuatan apa-apa. Karena pihak Konsulat yang diharapkan, dan para laki-laki berseragam yang diharapkan bisa melindungi justru tidak dia dapatkan. Kekurang pahaman TKW tentang negara tujuan, kurangnya pendidikan dan pengalaman juga menjadi sebab banyak TKW menjadi korban *trafficking*. Salah satu kasus yang di temui penulis (masih di Penang) menunjukkan hal ini:

Seorang gadis muda —masih sangat muda bahkan— berumur 16 tahun dari salah satu kota di Jawa tengah, masih sangat stress ketika penulis ke sana, dia hanya menangis tak mampu berkata apa-apa. Kulitnya yang putih bersih dan wajahnya yang cantik nampak pucat dan tubuhnya kurus. Teman-teman sepenampungan tak berhasil menghibur hatinya. Penulis dengan susah payah mencoba mendekati dan meminta dia cerita masalahnya, siapa tahu bisa mengurangi penderitaannya. Akhirnya dia mau bercerita denga tanpa direkam dan sendirian, maka penulis mengajakanya ke mushola konsulat Penang. Dia adalah pekerja ilegal hanya berbekal visa kunjungan dia direkrut oleh calo yang diperkenalkan tetangganya. Kemudian dia diperkerjakan sebagai pembantu rumah tangga, dengan siksaan dan tanpa bayaran selama 3 bulan dia tak menerima gaji sedikitpun, paspor disita majikan, akhirnya dia melarikan diri tanpa bekal apapun, hanya baju yang melekat di badan. Dengan tanpa pengetahuan sedikitpun tentang Malaysia dia tak tahu harus ke mana. Ketika dia kelelahan di Masjid beristirahat dia di dekati oleh seorang Bangladesh yang berdalih ingin menolongnya. Dengan lugu gadis ini menceritakan masalahnya, justru itulah kesalahannya, karena si Bangladesh tadi memanfaatkan penderitanya. Dia berdalih akan memberi pekerjaan sebagai pembantu di rumahnya karena istrinya tak punya pembantu. Mula-mula majikan barunya ini baik, sangat perhatian dan tidak berlaku kasar. Baru 1 minggu kemudian ketika istrinya keluar ruamah si Bangladesh ini

berlaku seperti biasa bahkan gadis itu diberi minum susu Milo yang rupanya sudah dicampur obat-obatan, dan dia kemudian pingsan/ tertidur. Dia di perkosa ketika sadar dia tak bisa apa-apa karena apartemen di kunci. Hal itu selalu dilakukan majikannya dengan tindak kekerasan dan ancaman akan dilaporkan polisi sebagai pendatang haram tanpa paspor jika tak mau melayani nafsu majikan. Denga terpaksa dia mau melayaninya, setiap istri majikannya pergi. Pada suatu kesempatan setelah dia berhasil membuka pintu kayu apartemen, namun pintu teralisnya di gembok dia berteriak-teriak beruntung tetangga apartemen mendengar dan dia menceritakan masalahnya, barulah dia diantar ke Konsulat.

Kasus itu hanya satu dari sekian ribu kasus dengan liku-liku dan fenomena *trafficking* yang berbeda-beda. Kasus sesama TKI yang menawarkan TKW juga banyak.

Salah satunya adalah di Hill Park Kuala Lumpur. Pada waktu itu sedang akan dibangun kondominium mewah terdiri beberapa unit. Seluruh pekerjaannya adalah orang Indonesia ada 250 orang TKI 25 diantaranya adalah TKW, mereka tinggal bersama dalam bedeng-bedeng bangunan tersebut. Transaksi antar sesama TKI dan TKW juga terjadi di sana. Mereka bertansaksi murni karena uang, banyak diantara TKI dan TKW ini saling tahu sama tahu, siapa membutuhkan siapa, biasanya ada teman sebagai perantaranya. Dari kasus ini terlihat jelas bahwa sesama TKI juga melakukan trafficking. Penulis tinggal di bedeng bersama mereka selama 1 minggu. Ketika penulis kembali ke Base Camp di apartemen penulis di Pantai Dalam Kuala Lumpur, ada seorang TKI dari Jawa Timur yang sering bermain ke apartemen, dan kami semua satu apartemen (Mahasiswa Indonesia yang kuliah di Universiti Malaysia) bersahabat dengan dia. Ketika suatu hari penulis akan mengambil data TKI tersebut bersedia mengantar, kami pulang larut malam pukul 24.00. Teman satu apartemen sudah cemas semua. Ketika TKI tersebut sudah pulang teman-teman penulis mengatakan setengah marah bahwa tindakan saya sangat berbahaya. Kemudian penulis bilang bahwa tidak apa-apa kok dia baik. Apa jawaban mereka? "Eh.....! Mbak jangan salah, di sini yang sering melakukan kejahatan, pencurian, pencopetan dan pemerkosaan adalah orang kita juga bukan orang melayu. Jadi yang jahatin TKW kita itu ya TKI kita-kita juga". Naluri peneliti saya mendorong saya untuk membuktikan pernyataan tersebut. Penulis tetap berkunjung ke

Hill Park dan TKI dari Jawa Timur tersebut tetap mengantar penulis kalau ambil data tiap malam, dan ternyata benar, dia ada maunya.

Dari kasus ini bisa dilihat bahwa keterusterangan penulis sebagai peneliti dan penulis bekerja sebagai dosen tak ada pengaruhnya juga bagi TKI tersebut. Dia hanya melihat bahwa penulis adalah perempuan dari Indonesia yang sedang bekerja di Malaysia, dia tak peduli dengan status penulis. Sejak saat itu penulis pindah apartemen dan teman se apartemen mengatakan jika penulis sudah pulang ke Indonesia.

Trafficking di Malaysia bisa dilakukan oleh siapa saja, antar orang Indonesia, Calo dan Agen di Malaysia dan Indonesia, atau bahkan sopir taksi sekalipun. Kasus yang dialami penulis juga bisa menandakan hal ini.

Ketika penulis naik taksi yang sopirnya orang Bangladesh dia langsung ramah mengajak bicara menggunakan bahasa Inggris. Dia ngobrol banyak hal dan bertanya banyak hal tetapi penulis masih menerka-nerka ke mana arah bicaranya. Ketika tahu tujuan penulis akan menemui teman TKW di Summit SubangJaya (Summit adalah Plaza yang besar dan mewah yang berada di Subang Jaya, Malaysia), dia langsung bertanya, apakah penulis orang Philipina? Kemudian penulis jawab: "Bukan saya orang Indonesia", dengan heran dan terkejut dia bilang: "Masak ada orang Indonesia seperti kamu, biasanya yang di sini adalah pembantu rumah, terlihat bodoh dan jelek". Penulis tidak protes justru ingin tahu apa yang ada di pikirannya ketika tahu bahwa penulis adalah orang Indonesia. Dia kemudian bilang: "Harusnya kamu tidak bekerja sebagai pembantu rumah, orang seperti kamu banyak dicari dan akan mudah mendapatkan uang, kamu bekerja saja di Petaling jaya saya punya teman dia kerja di Klub, nanti kamu melayani tamu, enak bayarannya sangat tinggi bisa 1000 sampai 2000 ringgit tiap bulan, belum kalau ada tamu yang kasih kamu uang, kalau mau nanti malam saya antar ke sana, paling-paling jadi pembantu rumah gajimau hanya 350 sampai 500 ringgit" katanya nyerocos kemudian dia memberi kartu nama. Penulis bilang akan pikir-pikir dulu nanti

saya hubungi. Ketika dia minta nomor telepon dan alamat, penulis mengelak.

Dari kasus tersebut bisa dilihat betapa yang namanya dunia luar rumah di Malaysia sesungguhnya sangat tidak nyaman bagi TKW kita. *Image* jelek selalu melekat pada TKW kita yang menjadikan kedudukan dan status TKW kita makin rentan. Dari obrolan penulis dengan sopir taksi juga terungkap bahwa dia bisa mencarikan pekerjaan sambilan bagi TKW-TKW kita yang tidak bekerja sebagai pembantu rumah, tapi bekerja di Toko atau pelayan restoran. Di siang hari dan di malam hari bekerja sebagai PSK di klub-klub malam.

Trafficking juga terjadi di pondok-pondok di tengah perkebunan. Banyak TKI ilegal kita yang mempunyai jaringan atau kurir untk memesan atau mencarikan PSK bisa dari TKW kita atau dari PSK setempat apapun bangsanya. Bahkan Mandor perkebunanpun ikut ambil peran dalam jaringan trafficking ini. Kasus yang diceritakan seorang TKI sangat menarik. Dia mengatakan kalau dia mau mencari PSK bisa didapatkan di mana saja mudah sekali tinggal pesan pada teman-teman yang suka keluar ke kota, biasanya PSK akan datang di pondok di tengah kebun, dengan bayaran yang cukup murah yaitu 15 sampai 25 ringgit sekali pakai. Kalau sudah langganan tak usah menawar lagi. Bahkan kata TKI tersebut, kalau dia lagi tak punya uang cukup memesan pada mandor nanti mandor yang mencarikan dan bayarannya ditanggung sang mandor dulu barulah nanti akhir bulan potong gaji.

Dari ilustrasi tersebut bisa disimpulkan betapa pelayanan seks dan bursa *trafficking* begitu mudah terjadi, tanpa uangpun ada yang membayari terlebih dahulu, dan ada yang menjamin tak ada aparat yang tahu karena biasanya yang mencari keluar dai perkebunan adalah orang-orang yang sudah biasa mencari, mandor dan TKI legal lain yang akhirnya mempunyai pekerjaan sebagai *trafficker*

untuk teman sesama TKI.

Fenomena menarik lain adalah banyak TKW yang menikah dengan TKI di bawah tangan hanya untuk urusan-urusan uang, artinya TKW mau menikah dengan TKI asal tahu sama tahu tidak menuntut macam-macam karena masing-masing sudah mempunyai istri dan suami, serta TKW ditanggung hidupnya selama di Malaysia.

Kasus di rumah kontrakan para TKW ilegal di Taman Danau Desa menggambarkan hal ini, banayak TKW kita dari Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa timur tinggal menyewa apartemen yang di sekat-sekat menjadi kamar-kamar kecil. Satu kamar berisi 3 orang TKW denga sewa 50 ringgit per bulan untuk tiap orang. Penulis sempat tinggal dengan mereka satu kamar dengan TKW asal Jawa Tengah, yang sudah dikenal penulis. Di apartemen itu sudah biasa kalau teman-teman sesama TKW mempunyai suami dan mereka sudah tahu sama tahu. Yang lebih menarik lagi ada profesi Kadi (orang yang menikahkan pasangan TKI – TKW dan juga profesi dukun bayi) profesi ini dijalani oleh orang-orang Indonesai yang sudah lama tinggal di Malaysia (kampung Kerinchi dan Kampung Jawa). Para dukun bayi ini bertugas melakukan aborsi jika ada TKW kita yang hamil dengan TKI dan mereka tak mau ambil resiko. Obat KB juga beredar bebas dikalangan TKI TKW.

Kasus lain yang juga semnpat penulis lihat adalah fenomena perempuan-perempuan muda yang bkerja di pabrik-pabrik berdandan begitu atraktif selepas jam kerja untuk menarik lawan jenisnya hanya karena dia ingin uangnya saja. Salah satu perusahaan elektroni di Penang yang berhasil penulis masuki menggambarkan betapa TKW kita yang muda-muda dan cantik cantik rata-rata lulusan SMA, SMEA berdandan ala selebritis dan banyak kasus yang hamil kemudian dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Dan satu komentar bagian personalia perusahaan tersebut (orang Cina): “Pekerja Indonesia sangat rajin, sangat tekun dalam bekerja tetapi dia mempunyai masalah sosial yang sangat jelek, dia suka melanggar aturan yang sebenarnya sudah kami buat untuk melindungi dirinya” (Kasus ini terjadi di UNION PIPPES Penang, Malaysia)

Dari berbagai ilustrasi tersebut bisa kita

lihat betapa sebenarnya fenomena *trafficking* begitu mudah terjadi, dilingkari jaringan yang rapi dan sangat mudah mencari korban dan perempuan yang mengkorbankan diri. Fenomena di Malaysia ini begitu nyata, tetapi polisi dan aparat juga tak bisa berbuat apa-apa. Polisi di Kuala Lumpur sudah tahu sama tahu karena para TKW ilegal kita tiap bulan memberi upeti mereka, masing-masing TKW 30 ringgit, agar mereka mendapatkan perlindungan. Jadi yang mulai menyaup polisi di Malaysia juga orang-orang kita juga. Tak jarang TKW yang terkena razia juga merayu polisi Malaysia. Termasuk penulis menyamar sebagai pekerja *cleaning service* di kantor Telekom Malaysia dan ketika ada razia penulis juga diajari untuk menyaup polisi. Oleh karena itu *trafficking* di Malaysia itu seperti antara ada dan tiada.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Ada beberapa hal yang sebenarnya patut kita renungkan, ada dua pola yang terjadi dari kasus di Malaysia. *Pertama*, adalah TKW yang menjadi korban dan benar-benar sebagai korban yang tak tahu akan di tipu untuk dipekerjakan sebagai pemuas nafsu. *Kedua*, adalah TKW yang mengorbankan diri demi mencari kemudahan tambahan uang, meskipun awalnya dengan terpaksa lama kelamaan menjadi biasa.

Ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan acuan mengapa para *trafficker* begitu mudah lepas jeratan hukum dan korban

banyak berjatuh: (1) Belum ada peraturan pemerintah yang secara tegas membela atau melindungi tenaga kerja perempuan yang dikirim ke luar negeri. Aparat negara juga belum tampak keseriusannya dalam melindungi kepentingan TKW yang menjadi korban *trafficking*, atau yang mengalami eksploitasi, penipuan dan kekerasan. (2) Ada indikasi sindikat perdagangan perempuan melibatkan oknum-oknum aparat (sipil, militer, kepolisian) terhadap hal ini belum ada langkah-langkah nyata pemerintah untuk menangani secara sistematis sebagai tindakan pencegahan. (3) Belum ada koordinasi antar instansi pemerintah dalam menangani masalah *trafficking* perempuan dan anak.

Saran

Karena itu tampaknya pemerintah perlu melakukan langkah-langkah antara lain: (1) Perlunya memberdayakan TKW/TKI melalui diri sendiri, dengan membangun kesadaran hubungan gender yang lebih seimbang, dengan kesadaran akan eksistensi perempuan sehingga perempuan menyadari hak-hak sebagai perempuan dan sebagai pekerja. Demikian pula para TKI haruslah disadarkan sebagai “pelindung” sesama TKI pada TKW jangan malah menjadi *trafficker*. (2) Pembuatan Undang-Undang yang secara tegas melarang praktik-praktik perdagangan perempuan dan anak dengan sanksi yang berat kepada *trafficker* dan pihak yang langsung memfasilitasi *trafficking* perempuan. (3) Penerapan hukum secara tidak pandang bulu kepada pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas *trafficking* perempuan dan anak. (4) Pengembangan jaringan aksi

penanggulangan *trafficking* perempuan dan anak, yang melibatkan unsur-unsur birokrasi sipil, intuisi keamanan, intuisi hukum, intuisi bisnis, dan organisasi masyarakat. (5) Mengingat *trafficking* melewati batas negara maka jaringan antara negara dan bangsa perlu dikembangkan.

Tampaknya memang hal tersebut sudah sering direkomendasikan dan hanya seperti slogan saja, Tapi kalau tidak sekarang kapan mau dimulai memberantas *trafficking* perempuan dan anak?

DAFTAR RUJUKAN

- Berliani, Hasbi. 1999. *Perilaku Seksual Pekerja Migran*. Pusat Penelitian Kependudukan UGM. Yogyakarta.
- Hull, Terence H., Endang Sulistyarningsih dan Gavin W. Jones. 1997. *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Kerjasama Pustaka Sinar Harapan dengan The Ford Foundation.
- Jones, Sidney. 2000. *Making Money off Migrants: The Indonesian Exodus to Malaysia*. Center for Asia Pacific Social Transformation Studies University of Wollongong. Hongkong.
- Sumarlin, W dan Lientje Setyowati. 1999. *Pelecehan Tenaga Kerja Perempuan*. Yogyakarta: PPK-UGM.
- Suyanto. 2002. *Perdagangan Anak dan*